

Manfaat Kenaikan Pajak Atas Produk Tembakau di Indonesia

1. PAJAK YANG LEBIH TINGGI AKAN MENURUNKAN PREVALENSI MEROKOK, TERUTAMA DI KALANGAN REMAJA

Setiap tahun, perilaku merokok membunuh sekitar 225.700 orang Indonesia dan membuat negara ini kehilangan 6 juta tahun produktif yang hilang (*DALYs loss, disability-adjusted life years*). Prevalensi merokok yang lebih rendah akan menyelamatkan nyawa, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mengurangi penderitaan masyarakat Indonesia.

Kenaikan pajak sebesar 25% pada tahun 2021 akan menurunkan prevalensi perokok dewasa dari 33,8% menjadi 32,0%, dan prevalensi perokok remaja dari 9,1% menjadi 8,6%. Hal ini akan mengurangi 340.000 kematian dini dan mencegah sekitar 200.000 anak-anak Indonesia untuk mulai merokok. Pada saat yang sama, produktivitas tenaga kerja akan meningkat karena kesehatan penduduk yang lebih baik, dan perekonomian akan menghasilkan 126.000 pekerjaan baru pada akhir tahun 2021 karena pengeluaran rumah tangga bergeser dari sektor tembakau. (Tabel 1)

Tabel 1: Dampak kenaikan pajak tahunan sebesar 25%

Prevalensi Merokok pada 2021 (%)		Kematian dini yang dicegah (000)	Nominal Pendapatan Cukai 2021 (164,9 Rp Triliun *)	Dampak Pekerjaan Bersih (000)		Perubahan Pendapatan RT (%)	Perubahan PDB (%)
Dewasa 33.8%	Remaja 9.1%			Orang	% Perubahan Total Pekerjaan		
32.0	8.6	340	226	126	0.10	0.03	0.0026

Catatan: * Nilai 2019 digunakan sebagai baseline; RT = rumah tangga

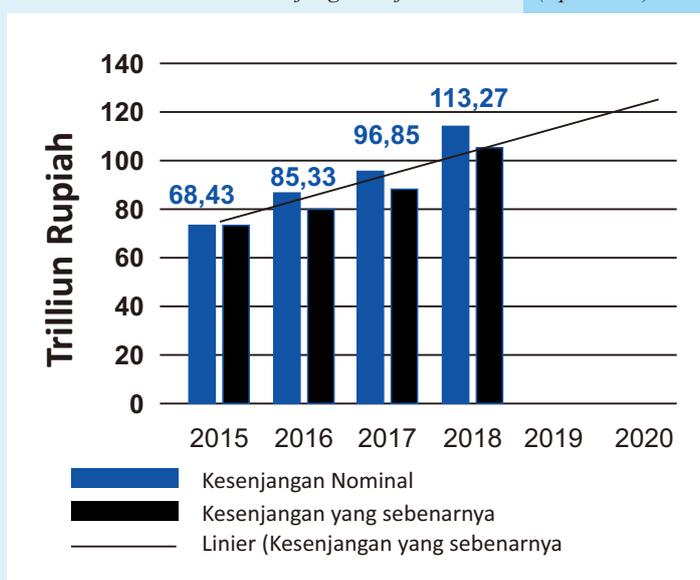
Sumber: Usulan Strategi Antar Sektor tentang Pengendalian Tembakau di Indonesia. Bappenas, 2020.

2. PAJAK YANG LEBIH TINGGI AKAN MENGURANGI BIAYA MEROKOK DAN MENINGKATKAN KAPASITAS PERAWATAN KESEHATAN

Prevalensi merokok yang lebih rendah akan mengurangi biaya terkait penggunaan tembakau yang mencapai setidaknya Rp441 triliun pada tahun 2019 (Kosen, dkk. 2017 dan penyesuaian inflasi) dan terus meningkat.

Perilaku merokok bertanggung jawab atas setidaknya Rp19 triliun dalam kelebihan permintaan perawatan kesehatan pada tahun 2019 (Kosen, dkk. 2017 dan penyesuaian inflasi), atau sekitar 20% dari pengeluaran JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) (BPJS, 2019).

Gambar 1: Indonesia: Kesenjangan Pajak Tembakau (Rp Triliun)



Sumber: David P. Tobacco Control 2019; 28: 558–561 dan perhitungan penulis

Pajak cukai rokok terlalu rendah untuk membayar biaya yang dibebankan oleh rokok pada masyarakat dan kesenjangan pajak ini meningkat dari waktu ke waktu (Gambar 1 menunjukkan kesenjangan antara penerimaan cukai tembakau dan biaya merokok dari waktu ke waktu).

Pada tahun 2019, perekonomian (diukur dengan PDB) kehilangan setidaknya Rp300 untuk setiap batang rokok yang dikonsumsi di Indonesia (Tabel 2). Jika biaya kecanduan ditambah (diukur dengan pengeluaran RT untuk rokok oleh pecandu rokok), kerugian mencapai hampir Rp1000 per batang. Banyak perokok ingin berhenti tetapi tidak bisa karena kecanduan nikotin. Pajak perlu naik setidaknya Rp620-Rp1288 per batang hanya untuk kompensasi pemerintah atas biaya merokok.

Tabel 2: Analisis Biaya-Manfaat, 2019

	Biaya penggunaan rokok (Rp triliun) ²	Rokok yang diproduksi (Milyar)	Biaya per batang (Rp)	Manfaat ekonomi : Rata-rata harga eceran rokok (Rp 944) ³		[Biaya - Manfaat] per batang (Rp)	
				Harga industri (yaitu kontribusi terhadap PDB)	Semua pajak (yaitu kompensasi untuk biaya merokok)	Kerugian ekonomi = biaya - harga eceran	Kerugian pemerintah = biaya - pajak
Termasuk Biaya Kecanduan	680.97	356.5	1910	322	622	966	1288
Tidak Termasuk Biaya Kecanduan	442.61	356.5	1242	322	622	298	620

Sumber: Usulan Strategi Antar Sektor tentang Pengendalian Tembakau di Indonesia. Bappenas, 2020. RT = rumah tangga

3. PAJAK YANG LEBIH TINGGI AKAN MENGHASILKAN PENDAPATAN UNTUK DANA UHC, KESIAPSIAGAAN BENCANA DAN PEMULIHAN EKONOMI

Meningkatkan cukai sebesar 20% setiap tahun dan mengalokasikan setengah dari pendapatan baru ke jaminan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) akan menyebabkan defisit JKN menghilang pada tahun 2022 dan memungkinkan perluasan UHC setelahnya. Setengah lainnya dari pendapatan yang baru dihasilkan (sekitar Rp 30 triliun pada tahun 2021 dan lebih banyak setiap tahun berikutnya) dapat diinvestasikan dalam kesiapsiagaan bencana dan pemulihan ekonomi pasca Covid, termasuk dukungan bagi petani tembakau dan pekerja saat ini untuk beralih ke karir alternatif. Sektor tembakau merampas kehidupan Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

REKOMENDASI

1. Tingkatkan pajak tembakau setiap tahun setidaknya 25% pada tahun 2021. Peningkatan pajak yang lebih kecil tidak akan berdampak signifikan pada tingginya prevalensi perokok dewasa, tidak akan menurunkan prevalensi perokok muda, dan akan meningkatkan kesenjangan antara pendapatan pajak tembakau dan biaya merokok.
2. Sederhanakan struktur pajak tembakau dengan menggabungkan tingkatan untuk meningkatkan dampak pajak yang lebih tinggi pada penurunan prevalensi (dengan mengurangi manipulasi harga industri yang mengakibatkan substitusi ke merek rokok dengan harga lebih rendah) dan untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak (dengan mengurangi kesempatan untuk penghindaran dan penggelapan pajak).
3. Gunakan sebagian dari pendapatan pajak tembakau untuk membiayai UHC (karena investasi semacam itu menawarkan keuntungan yang tinggi dan memanfaatkan dividen demografis) dan pemulihan pasca-Covid untuk mengurangi dampak pandemi pada perekonomian secara keseluruhan.

¹Hal ini memperhitungkan keterkaitan ke belakang dan ke depan dalam industri tembakau.

²Inflasi kumulatif 2015-2019 sebesar 14,14%.

³Dihitung sebagai rata-rata tertimbang harga SKM, SKT dan SPM pada tahun 2019.